PEMBANGUNAN PERTANIAN DI KECAMATAN RUMBAI

KOTA PEKANBARU TAHUN 2011

elvidanoraip@yahoo.com/085265474177

Oleh: **Elvi Danora** atas bimbingan **Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si**

ABSTRACT

Agricultural development is one of the national development agenda in order to strengthen the resilience of the national economy in the field of food. This can be seen with the Law No. 41 Year 2009 on the Protection of Agricultural Land Sustainable Food. What concerns the Act is certainly not just food crops alone but others as well as crops and horticulture.

This study deals with what has been the government's vision of the city of Pekanbaru the Department of Agriculture. Served in the agricultural sector with the vision of agribusiness centers in the city of Pekanbaru which can improve the availability of vegetable protein. It is based on the pattern of community life in the city of Pekanbaru the consumer, agricultural products which are completely purchased. So with such Pekanbaru City government, particularly the Department of Agriculture is trying to meet all the planning of agricultural development in accordance with the potential of some areas in the city of Pekanbaru that still has the potential of agriculture to develop. Mainly located in the district agriculture Rumbai that still has great potential to be developed. However, in the stage of realization was experiencing multiple barriers to implementation, such as budget, availability of land, and implementers (government and farmers).

Keyword : development, agricultural development and agropolitan

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan wilayah merupakan program nasional yang saat ini dipacu oleh Indonesia. Hal tersebut merupakan upaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat nasional Indonesia. Sektor pertanian merupakan salah satu agenda pembangunan tersebut dalam rangka memperkuat ketahanan perekonomian bangsa. Hal ini ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pembangunan di sektor ini dapat dikatakan berhasil apabila pengembangan usaha pertanian, sumber daya manusia yang handal dan berkualitas serta diopang oleh kelengkapan sarana dan prasarana dapat terpenuhi dengan baik.

Apa yang menjadi agenda ataupun program dari pemerintah pusat tentu juga menjadi program bagi pemerintah daerah. Di Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota juga telah merancang pembangunan untuk sektor ini sesuai dengan potensi wilayah. Salah satu wilayah yang direncanakan untuk pembangunan pertanian adalah kecamatan Rumbai dengan jenis tanaman

Palawija dan Holtikultura. Dengan menetapkan indikator keberhasilan apabila konsumsi untuk wilayah Kota Pekanbaru telah mencukupi dan diharapkan dapat mengekspor ke luar daerah. Daerah yang telah dipilih dalam hal ini kecamatan Rumbai tentu telah melalui pertimbangan dengan melihat potensi wilayahnya.

Permasalahan yang terjadi dalam hal pembangunan tersebut diantaranya adalah perencanaan yang dibuat tidak sesuai dengan potensi yang ada di lapangan. Sebagai contohnya seperti tanaman manggis dan melon yang direncanakan pengembangannya oleh Dinas pertanian, sedangkan yang terjadi minat petani terhadap tanaman ini rendah karena permintaan pasar rendah dan biaya perawatannya mahal. Untuk jenis tanaman palawija sendiri meliputi jagung, cabe, ketela pohon dan bayam. Sedangkan untuk jenis tanaman hortikultura adalah rambutan, durian, pepaya, melon dan manggis. Namun, dari apa yang telah direncanakan tersebut belum bisa mencapai target atau indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan di lapangan.

1.2 Tinjauan Pustaka

Proses perencanaan yang dilihat dari beberapa pendekatan seperti berikut ini;

1. Perencanaan Inkremental atau sering disebut sebagai "*science of nuddling trough"* pendekatan ini hanya memfokuskan diri dalam mengelola isu-isu saat ini atau jangka pendek dan kurang mempertimbangkan tujuan-tujuan jangka panjang, oleh karenanya pendekatan ini kadang dianggap sebagai pendekatan yang pro-inertia dan anti inovasi. Sesuai dengan *scope* kewenangannya yang relatif sempit dan parsial.
2. Perencanaan Adaptif, yaitu suatu pendekatan yang didasarkan atas proses pengendalian adaptif yang berfokus pada proses pengambilan keputusan yang berdasarkan pengalaman. Pendekatan ini dilakukan seperti apabila diperoleh informasi baru maka segera dilakukan *review* atas suatu pengelolaan yang sedang berjalan sehingga dirumuskan pendekatan-pendekatan berikutnya.
3. Perencanaan Rasional *(Rasional Planning)*, pendekatan ini sering juga disebut sebagai pendekatan yang komprehensif. Kesempurnaan dari pendekatan ini adalah terletak pada ketersediaan informasi. Keunggulan dari sifatnya yang komprehensif dan rasional pada akhirnya akan dibatasi dan ditentukan oleh ketersediaan informasi. Tanpa suatu informasi dan pengetahuan yang "sempurna" akan sulit dihasilkan perencanaan yang baik.
4. Perencanaan Partisipatif/Konsensus, perencanaan ini muncul karena protes atas perencanaan rasional. Dalam pendekatan ini dikatakan perlu adanya partisipasi dari *stakeholder* untuk sebuah perencanaan karena rasionalitas saja tidak cukup sebab ia terbatas.
5. Pendekatan Perencanaan Rasional –Partisipatif, pendekatan ini merupakan gabungan dari dua pendekatan sebelumnya yaitu penekatan rasional dan pendekatan partisipatif.[1]

[1] Ernan Rustiadi, dkk. *Perencanaa dan Pengembangan Wilayah.* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011). Hal. 343-348.

Kemudian teori berikutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh van Meter dan van Horn model dasar yang dilukiskan mempunyai enam variabel yang membentuk kaitan *(linkage).* Enam variabel tersebut adalah:

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

   Menurut van Meter dan van Horn identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan.

2. Sumber-sumber kebijakan
   Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang *(incentive)* lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana
   Komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan ke bawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebarluaskannya, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber-sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi-interpretasi yang tidak konsisten terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan atau jika sumber-sumber yang sama memberikan interpretasi-interpretasi yang bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-maksud kebijakan.
4. Karakteristik badan-badan pelaksana
   Van Meter dan van Horn mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplemntasikan kebijakan:
   1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
   2. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana;
   3. Vitalitas suatu organisasi;
   4. Tingkat komunikasi-komunikasi terbuka, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horisontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
   5. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan "pembuat keputusan" atau "pelaksana keputusan".
5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik
6. Kecenderungan pelaksana *(implementators*).[2]

Kemudian teori selanjutnya yang dipakai dalam menganalisis permasalahan ini adalah teori tentang pelaksanaan yang dikemukakan oleh Mustopadijaya, yang mengatakan terdapat tiga jenis pelaksanaan yaitu:

1. Pelaksanaan secara langsung, untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan dimana pemerintah melakukan sendiri berbagai keputusan, ketentuan, dan aturan yang mendukung pelaksanaan pembangunan.

[2] Budi Winarno. Kebijakan Publik Teori dan Proses, (Jakarta: Media Pressindo, 2002). Hal. 17.

2. Pelaksanaan tidak langsung adalah berbagai keputusan atau perundang-undangan, pemerintah melaksanakan sendiri pelaksanaan pembangunan tersebut tetapi hanya mengeluarkan ketentuan dan aturan yang dapat mempengaruhi perilaku atau tindakan masyarakat.
3. Pelaksanaan campuran adalah pelaksanaan dimana untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksudkan terbuka kesempatan atau peranan yang dapat dilaksanakan baik oleh instansi pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan ataupun campuran keduanya untuk melaksanakan pembangunan secara bersama-sama.[3]

6.3 Permasalahan

Perencanaan yang telah ditetapkan sebagai kebijakan oleh Dinas Pertanian Kota Pekanbaru untuk mencapai visi yang telah dibuat kurang sesuai dengan potensi yang ada di lapangan, sehingga belum bisa terealisasi dengan baik. Hal tersebut juga ditambah dengan adanya kendala di lapangan dan pelaksana, baik pelaksana dari Dinas Pertanian maupun petani. Kemudian komunikasi antara pelaksana dengan petani belum berjalan dengan baik sehingga menimbulkan sebuah kesenjangan yang berupa ketidaksepakatan antar keduanya dalam pembangunan yang telah direncanakan. Dengan hal tersebut perumusan masalah yang akan dijadikan acuan pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembangunan pertanian di kecamatan Rumbai tahun 2011 berdasarkan perencanaan dan target yang telah ditetapkan dan apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian tersebut.

6.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk melihat sejauhmana upaya Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pertanian untuk mewujudkan perencanaan yang telah dibuat untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis *snowball sampling* yaitu cara pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara berantai, teknik penentuan sampel mulanya kecil atau satu orang informan (*key informan*) saja kemudian menjadi banyak.

[3] Dikutip dari dari penelitian terdahulu yang berjudul perencanaan pembangunan oleh Hariansyah pada tahun 2010.

1. **Teknik pengumpulan data**
   a. Wawancara, yaitu merupakan proses tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Fokus yang diwawancarai adalah masalah pelaksanaan dan hambatan yang terjadi.
   b. Observasi, melakukan pengamatan terhadap obyek yang diteliti dari data tentang pertanian di kecamatan Rumbai.
   c. Dokumentasi, merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, seperti peraturan daerah dan peraturan Walikota.
2. **Teknik analisa data**
   a. Reduksi, yaitu dimulai dari kegiatan pengumpulan data dari berbagai sumber di lapangan untuk kemudian diolah menjadi bahan dalam pemaparan/deskripsi permasalahan yang diteliti.
   b. Deskripsi/penyajian data, yaitu pemaparan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan yang berupa masalah, fenomena dan data konkrit.
   c. Penarikan kesimpulan, yaitu penarikan suatu sudut pandang secara umum berdasarkan permasalahan yang telah disajikan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Perencanaan

Perencanaan suatu wilayah tentunya tidak dibuat begitu saja tanpa melihat kondisi nyata di lapangan. Sebelum perencanaan ditetapkan menjadi sebuah kebijakan untuk direalisasikan tentunya harus melewati berbagai proses dalam penyusunannya. Secara umum proses formal perencanaan mencakup kegiatan-kegiatan:

1. Pengumpulan data,
2. Melakukan pendugaan kecenderungan-kecenderungan masa datang yang mungkin terjadi,
3. Analisis biaya manfaat dari kemungkinan-kemungkinan skenario yang ada,
4. Mempertimbangkan berbagai skenario alternatif,
5. Memilih skenario terbaik/dikehendaki, Merencanakan pelaksanaan (*plan of implementation*).[4]

Begitu pula halnya dengan apa yang telah direncanakan oleh Dinas Pertanian Kota Pekanbaru pada pembangunan pertanian di kecamatan Rumbai, dimana bentuk rinci perencanaan tersebut sebagai berikut:

[4] *Op.cit.* hal. 350.

Tabel 1 Perencanaan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kawasan Perencanaan	Kecamatan	Jenis Tanaman	waktu	Indikator
1	Rumbai	Durian, Melon, Pepaya, Manggis Jagung, Ketela pohon, cabe, bayam	Durian, manggis dan belimbing 4 tahun. Tanaman lainnya 3-4 bulan	Cukup untuk konsumsi masyarakat Pekanbaru dan diharapakan dapat mengekspor ke luar daerah
2	Rumbai Pesisir	Manggis, Durian, Melon Jagung dan Terong		
3	Tenayan Raya	Jambu air, Salak, Belimbing, Semangka		
4	Marpoyan	Kangkung, jagung, Terong, cabe		
5	Tampan	Semangka dan Jagung		
6	Bukit Raya	Kacang panjang, Jagung, Terong, Mentimun, Ketela Pohon		
7	Payung Sekaki	Rambutan		

Sumber data: Dinas Pertanian Kota Pekanbaru

Proses sosialisasi dan komunikasi mengenai perencanaan yang dibuat oleh Dinas Pertanian kepada petani belum berjalan secara efektif. Dalam hal komunikasi antar pelaksana dengan petani dalam hal kebijakan pembangunan pertanian ini memang sangat penting. Sebagaimana menurut Uchjana (1999) komunikasi yang tercipta dalam organisasi yakni antara pimpinan dan bawahan terbagi atas;

1. Komunikasi Vertikal, yaitu komunikasi dari atas kebawah yakni komunikasi dari pimpinan ke bawahan dan dari bawahan ke pemimpin. Komunikasi ini sangat penting sekali karena terjadi timbal balik sehingga pimpinan dapat mengetahui laporan, tanggapan, gagasan atau saran dari pegawai bawahan sebagai petunjuk efektif atau tidaknya kebijaksanaan yang dijalankan.
2. Komunikasi horizontal adalah komunikasi secara mendatar yakni antara sesama anggota staf atau pegawai, pegawai tingkat menengah dengan tingkat menengah, pegawai tingkat menengah dengan pegawai rendahan atau pegawai rendahan dengan pegawai rendahan pula.
3. Komunikasi diagonal yaitu komunikasi dalam organisasi antara seseorang dengan orang lain yang berbeda kedudukan dan bagian yang dipegang.[5]

Untuk pelaksanaan perencanaan di Rumbai dalam hal pembangunan pertanian dianalisis dari pendapat Uchjana diatas maka komunikasi yang terjadi adalah horizontal. Jika komunikasi yang terjadi adalah vertikal maka pelaksanaan pembangunan pertanian akan terlaksana dengan baik.

[5] Uchjana dalam Eddy Wibowo.2005. *Seni Membangun Kepemimpinan Publik.* Yogyakarta: BPEE. Dikutip dari Norman Husein 2012.

3.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tahap kedua setelah perencanaan dilakukan. Pelaksanaan pembangunan pertanian di Kecamatan Rumbai dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian sebagai instansi teknis dibantu dengan Penyuluh Lapangan Pertanian (PPL) dan petani.

1. Lokasi

Ketersediaan lahan dalam pembangunan kawasan pertanian merupakan hal yang sangat penting. Kalau lahan tidak ada maka tanaman dan produksi hasil pertanian juga tidak akan ada. Wilayah Rumbai yang dikenal dengan sektor pertanian yang cukup besar di Kota Pekanbaru cukup memiliki lokasi yang strategis untuk pengembangan pertanian, selain dari wilayahnya yang masih luas. Permasalahan yang terdapat mengenai lokasi ini berdasarkan penelitian saya dan wawancara dengan Dinas Pertanian Kota Pekanbaru yaitu ketersediaan lahan.

Luasnya lahan pertanian saat ini yang sudah menghasilkan produksi dan yang sehrusnya seperti yang terdapat pada tabel berikut;

Tabel 6 luas lahan produksi yang sudah ada dengan yang seharusnya

Tananaman palawija (dalam ukuran Ha)

No.	Jenis Tanaman	Luas Lahan Yang Telah ada	Luas lahan seharusnya
1.	Ketela pohon	128	Sudah mencapai target
2.	Cabe	9,60	Belum mencapai target
4.	Jagung	111,0	Sudah mencapai target
5.	Bayam	2,40	Belum mencapai target

Sumber data: Dinas Pertanian Kota Pekanbaru 2011

Sedangkan untuk tanaman hortikultura dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 7 luas lahan produksi yang sudah ada dengan yang seharusnya

Tanaman hortikultura (dalam Ha)

No.	Jenis tanaman	Luas lahan yang ada	Luas lahan yang seharusnya
1.	Durian	5	15
2.	Pepaya	15	15
3.	Melon	-	-
4.	Manggis	3	10

Sumber data: Dinas Pertanian Kota Pekanbaru Tahun 2011

2. Jenis Tanaman

Sesuai dengan perencanaan yang dibuat dengan melihat potensi wilayah oleh Dinas Pertanian Kota Pekanbaru jenis tanaman untuk kawasan pertanian di kecamatan Rumbai adalah palawija dan hortikultura. Sejauh ini, tanaman yang baru mencukupi konsumsi untuk Kota Pekanbaru atau yang sudah mencapai target dari perencanaan adalah pepaya, jagung dan ketela pohon. Untuk penetapan jenis tanaman ini sebelum diputuskan menjadi sebuah perencanaan Dinas Pertanian melakukan percobaan terhadap tanaman yang berpotensi terlebih dahulu. Jika tanaman tersebut berhasil maka akan dimasukkan dalam perencanaan jenis tanaman yang akan dikembangkan.

3. Hasil

Dalam melihat pembangunan mengenai pertanian di kecamatan Rumbai ini dapat dilihat dari dua indikator yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kota, yaitu terpenuhinya konsumsi bagi masyarakat Kota Pekanbaru dengan terciptanya sentra agribisnis dan diharapkan dapat mengekspor ke luar daerah.

Namun, pada tahap pelaksanaan apa yang telah direncanakan belum bisa diwujudkan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya kendala di lapangan dan pelaksana baik pemerintah maupun petani. Komunikasi antara dua pelaksana tersebut belum efektif dalam mewujudkan pembangunan yang telah direncanakan. Sehingga, hasil dari apa yang telah direncanakan dalam pembangunan pertanian tersebut seperti berikut;

Tabel 2 hasil produksi (palawija) dalam hitungan ton

No.	Jenis tanaman	Hasil produksi per tahun	Keterangan
1.	Ketela pohon	2,064,0	Sudah mencukupi konsumsi
2.	Jagung	709,8	Sudah mencapai target
3.	Cabe	480,0	Belum mencukupi
4.	Bayam	240,0	kurang

Sumber data: Dinas Pertanian Kota Pekanbaru Tahun 2011

Tabel 3 hasil produksi (hortikultura) dalam hitungan ton

No	Jenis tanaman	Hasil produksi per tahun	Keterangan	Target
1.	Durian	22,54	Sangat kurang	350
2.	Pepaya	318,98	Mencapai target	300
3.	Melon	0	Kurang	150
4.	Manggis	3,24	Kurang	150

Sumber: data olahan berdasarkan penelitian Tahun 2011

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa apa yang telah dihasilkan masih jauh untuk memenuhi target.

3.3 Ketersediaan Sarana Penunjang

Untuk perlu diketahui adanya hasil produksi pertanian dari tanaman yang telah direncanakan untuk mendapatkan hasil produksi sesuai target yang ditetapkan tentu perlu sarana pendukung seperti pupuk. Begitu juga dalam pembangunan ini, pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian Kota Pekanbaru juga menerima bantuan pupuk bersubsidi untuk didistribusikan kepada petani sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Untuk lebih rincinya jenis dan jumlah pupuk yang tersedia seperti terdapat pada tabel berikut;

Tabel 3 Alokasi pupuk bersubsidi

No.	Jenis Pupuk	Jumlah alokasi
1	UREA	576
2	SP-36	140,6
3	ZA	56
4	NPK	246
5	ORGANIK	81,4

Sumber data: Dinas Pertanian 2011

Namun, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yang menjadi permasalahan adalah jumlah pupuk yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah luas lahan yang ada. Sehingga, menimbulkan kesan pendistribusian yang gtidak adil bagi petani karena tidak semuanya dapat memperoleh pupuk bersubsidi tersebut. Contohnya, pupuk UREA tersedia 576 ton setahun sedangkan kebutuhan yang seharusnya 1.111 ton.

Sedangkan untuk bantuan racun hama juga tidak tersedia dengan jumlah banyak dan pendistribusiannya satu paket dengan pendistribusian pupuk dan bibit. Permasalahannya petani dalam hal mengatasi masalah yang terjadi pada tanaman tidak selalu mau mengikuti saran dari petugas pertanian untuk menggunakan racun pembasmi yang disarankan.Kemudian untuk kegiatan pemberdayaan para petani hanya dilakukan dengan mengadakan penyuluhan. Kalau untuk kegiatan lainnya seperti kursus bagi petani itu tidak ada.

3.4 Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan

Belum tercapainya target perencanaan dari pelaksanaan yang telah dilakukan karena dalam pelaksanaan terdapat beberapa hambatan, yaitu;

1. Alokasi pupuk bersubsidi yang masih kurang

Seperti yang terdapat pada tabel diatas bahwa jumlah pupuk yang tersedia dalam angka 500 ton, sedangkan kebutuhan sesuai dengan lahan yang ada tidak bisa mencukupi.

2. Ketersediaan lahan masih minim

Dalam penelitian yang telah dilakukan bahwa ketersediaan lahan merupakan salah satu yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya pembangunan pertanian yang telah direncanakan. Ketersediaan lahan bagi para petani di Rumbai belum memadai untuk janis tanaman yang telah direncanakan oleh Dinas Pertanian. Seperti misalnya untuk tanaman durian dan manggis.

3. Komunikasi antar pemerintah dan petani belum efektif
4. *Sense of belonging* para petani terhadap bantuan pemerintah masih kurang
5. Komunikasi antar pelaksana (pemerintah dan petani) belum terbangun dalam satu visi seperti apa yang menjadi visi dari Dinas Pertanian.

Kesimpulan yang penulis tarik dari penelitian yang telah dilakukan dan berdasarkan analisis dengan teori yang ada adalah bahwa apa yang telah direncanakan oleh Dinas Pertanian Kota Pekanbaru untuk mewujudkan perencanaan yang telah ditetapkan sebagai kebijakan sebagai penyedia protein nabati bagi masyarakat Pekanbaru sejauh ini belum bisa diwujudkan dengan baik.

Ucapan Terima Kasih

Terselenggaranya penelitian ini tidak terlepas dari adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini. Bantuan baik berupa moril maupun materiil.

1. Ucapan terima kasih kepada bapak Edwar Yunus selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kota Pekanbaru yang telah banyak memberikan informasi dan data dalam kegiatan penelitian ini.
2. Ucapan terima kasih tak terhingga kepada bapak Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si selaku pembimbing yang dengan sabar membimbing saya dalam penelitian ini. Terima kasih atas saran, pikiran dan waktu yang telah diberikan.
3. Ucapan terima kasih kepada petani, khususnya kelompok petani sepakat dan Rumbai Bukit.

4. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budi Winarno.2002. *Kebijakan Publik Teori dan Proses,* (Jakarta: Media Pressindo).
Ernan Rustiadi, dkk. 2011. *Perencanaa dan Pengembangan Wilayah.* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
Uchjana dalam Eddy Wibowo.2005. *Seni Membangun Kepemimpinan Publik.* Yogyakarta: BPEE. Dikutip dari Norman Husein 2012.
Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Rustiadi, Ernan. Dkk. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonsia.
Satori. Djam'an dan Aan Komariah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: ALFABETA.
Suyanto, Bagong dan Sutinah.2010. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peraturan

UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
UU Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.
Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2011 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Rakyat, Peternakan dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2011.